

SOLO POS
Halaman X dan XI
Edisi Senin, 6 Januari 2014

► **DUGAAN KORUPSI**

BPK Diminta Audit Dana Persis Secara Mandiri

SOLO—Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bakal mengadukan kasus dugaan korupsi dana APBD Solo 2007 untuk Persis Solo senilai Rp10 miliar ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Januari ini. BPK diminta mengaudit dana Persis secara mandiri.

Koordinator MAKI, Boyamin, saat dihubungi *Espos*, Minggu (5/1), mengatakan pihaknya selaku masyarakat yang peduli atas pemberantasan korupsi di Indonesia merasa kecewa atas tak kunjung tuntasnya penyelesaian masalah tersebut. Menurutnya, indikasi korupsi dalam kasus itu cukup jelas. Berdasar investigasi yang telah dilakukan MAKI, Boyamin mengaku mendapatkan informasi penggunaan dana Rp2 miliar-Rp3 miliar dari Rp10 miliar yang diterima Persis tidak sesuai peruntukannya. Ia menyebut dana tersebut digunakan untuk membayar utang Persis pada kepengurusan sebelum menerima dana, yakni 2006.

"Saya mendapat informasi, polisi telah menyimpulkan perkara Persis bukan perkara korupsi, melainkan perkara perpajakan. Kesimpulan polisi didasarkan pada hasil audit BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan]. Saya kaget, ternyata selama ini pengauditnya adalah BPKP," ujar Boyamin.

Bersambung ke Hal. XI Kol. 1

BPK Diminta Sambungan dari Hal. *Soloraya*

Berdasar pengalaman, lanjut dia, hasil audit BPKP beberapa kali digugat. Hasilnya, gugatan itu dimenangkan penggugat. Menurut Boyamin hal itu berarti hasil audit BPKP tidak sah karena BPKP tidak berwenang mengaudit. Ia mencontohkan kasus Indosat IM2 Jakarta, Maret tahun lalu. Indosat dikatakan Boyamin kala itu selaku penggugat. Atas dasar itu Boyamin berencana meminta BPK untuk mengaudit penggunaan dana Persis. Ia memandang BPK adalah

lembaga yang paling berwenang mengaudit keuangan negara.

"Upaya ini harus saya lakukan karena menunggu respons polisi tidak mungkin lagi. Pengauditan tidak melulu harus diminta oleh polisi atau kejaksaan. Masyarakat pun bisa saja mengadu ke BPK. Jika diketahui ada indikasi korupsi ya BPK akan memproses. Itu yang kami harapkan. Januari ini kami akan menyurati BPK," imbuh Boyamin.

Ia menginformasikan kasus Persis tak

jauh berbeda dengan kasus penggunaan dana hibah Persiba Bantul 2011 senilai Rp12,5 miliar. Kejaksaan Tinggi (Kejakti) DIY, ujar Boyamin, menduga terjadi penyimpangan administrasi, yakni kesalahan pencairan anggaran dan penyelewengan penggunaan. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang mendesak aparat Polresta Solo meminta BPK mengaudit ulang dana Persis. Mega Bintang menilai BPKP selaku pengaudit sebelumnya tidak berwenang mengaudit. *(Rudi Hartono)*